

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia memiliki potensi pasar terbuka yang baik untuk industri barang konsumsi makanan dan minuman, Dengan terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) di tahun 1994 pasar dunia cenderung semakin terbuka dan bebas hambatan. Ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk para pelaku di industri barang konsumsi makanan dan minuman untuk melakukan perluasan usaha atau ekspansi. Untuk melakukan perluasan usaha perusahaan memerlukan pengelolaan manajemen yang baik serta tingkat efektifitas yang tinggi, sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya.

Adanya hubungan asimetri informasi dan kecenderungan dari pihak eksternal yaitu para investor agar lebih memperhatikan laba sebagai parameter kinerja perusahaan, akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dalam menunjukkan informasi laba, yang disebut sebagai manajemen laba (*earnings management*).

Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam proses menyusun pelaporan keuangan sehingga

dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya (Scott, 1997 p.295 dalam Antonia 2008).

Manajemen laba dapat dilakukan melalui variabel *artificial* misalnya dengan pemilihan teknik akuntansi yang biasa untuk menaikkan atau menurunkan laba tahun berjalan, misalnya pemilihan metode depresiasi, tahun amortisasi, metode pencatatan persediaan, pengakuan *gain and losses*, dan sebagainya. Manajemen laba dengan menggunakan variabel riil (transaksional) dilakukan dengan cara memanipulasi penjualan dan biaya-biaya, misalnya mempercepat atau menunda penjualan akhir tahun dan pencatatan biaya (Primanita dan Setiono, 2006 dalam Sasono 2011).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba dalam perusahaan salah satunya yaitu praktek *corporate governance* (Agustia, 2013) .*Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (Sasono, 2011).

Istilah "*Corporate Governance*" pertama diperkenalkan *Cadbury committee* tahun 1992 dalam laporan yang dikenal *Cadbury Report*.Laporan ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Corporate Governance* sendiri adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*). “(*Forum for corporate Governance in Indonesia/FCGI*, dalam Sedarmayanti, 2012: 53).

Corporate Governance ini bisa dijadikan sebagai sistem yang akan menghubungkan antara para pemegang saham, dewan direksi, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan guna mewujudkan arah dan tujuan organisasi perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, penerapan *Corporate Governance* akan dilihat menggunakan proksi dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Suatu sistem *Corporate Governance* akan berjalan efektif tidak terlepas dari adanya dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (Surya dan Yustiavandana 2006:24). Dewan komisaris dibagi menjadi dua yaitu: dewan komisaris independen dan dewan komisaris non independen. Dalam penelitian ini penerapan *Corporate Governance* diprosikan pada dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen

adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, komisaris atau direktur dalam perusahaan.

Tanggung jawab komite audit dalam bidang Corporate Governance adalah untuk memastikan apakah perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan untuk mencegah adanya benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (Surya dan Yustiavandana 2006:148). Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab mengawasi manajemen dalam bidang laporan keuangan. Sehingga bisa dipastikan laporan laporan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya dan tidak ada penekanan biaya-biaya yang dilakukan terutama biaya pajak.

Salah satu penerapan Corporate Governance adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau intitusi lain Tarjo (2008) dalam Simarmata (2014). Pada penelirtian ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Semakin tinggi tingkat kepemiikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Keputusan dan aktivitas manajer yang memiliki saham

perusahaan tentu akan berbeda dengan manajer yang murni sebagai manajer. Manajer yang memiliki saham perusahaan berarti manajer tersebut sekaligus adalah pemegang saham. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menseleksi kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara manajer yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Untuk beberapa tahun terakhir banyak perusahaan yang menyadari pentingnya menerapkan program *Good Corporate Governance* sebagai bagian dari strateginya. Hal tersebut merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Masalah *Corporate Governace* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini didasarkan pada Teori Agensi (*Agency Theory*) yang dalam hal ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, selain memiliki kinerja keuangan yang baik perusahaan juga diharapkan memiliki tata kelola (*Corporate Governance*) yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik menggambarkan bagaimana usaha manajemen mengelola aset dan modalnya dengan baik agar menarik para investor (Pertiwi & Pratama, 2012).

Membentuk tata kelola yang baik untuk membatasi perilaku *opportunistic* manajemen, pemilik perusahaan dapat melakukan

berbagai hal antara lain dengan membentuk dewan komisaris independen. Hasil penelitian Marihot dan Setiawan (2007) menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya semakin banyak anggota dewan komisaris yang independen maka manajemen laba yang dilakukan akan semakin kecil. Namun, hasil penelitian Agustia (2013) menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Principal juga dapat membentuk komite audit untuk membantu pengawasan dewan komisaris terhadap proses pelaporan keuangan (Sasono, 2011). Hasil penelitian Marihot dan Setiawan (2007) menyimpulkan keberadaan komite audit ternyata dapat mengurangi manajemen laba dalam perusahaan. Namun, menurut penelitian Widiatmaja (2010) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Struktur kepemilikan ternyata juga dapat membatasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Agustia (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sasono (2011) menyimpulkan bahwa secara statistik kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba ditolak.

Agustia (2013) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial atau kepemilikan saham oleh manajer sendiri tidak mempunyai pengaruh

terhadap manajemen laba. Namun, Antonia (2008) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba ternyata menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* tersebut terhadap manajemen laba.

Pada penelitian ini memilih industri sektor barang konsumsi makanan dan minuman. Pemilihan industri sektor barang konsumsi makanan dan minuman menjadi pertimbangan tersendiri bagi peneliti, karena industri manufaktur sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, pada tahun 2015 triwulan pertama saja industri sektor makanan dan minuman mengalami pertumbuhan mencapai 8,16% lebih tinggi dari pertumbuhan industri non migas sebesar 5,21%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 4,71% . Oleh karena itu industri sektor makanan dan minuman menjadi objek yang menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursah Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan oleh penulis terkait latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu apakah mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai manajemen laba dan mekanisme Corporate Governance.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait pentingnya penerapan kebijakan *corporate governance* yang baik.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca guna memperluas pemahaman mengenai mekanisme Corporate Governance dan manajemen laba.